

II. PERENCANAAN STRATEGIS

Perencanaan strategis sangat terkait dengan nilai yang diterapkan dan membingkai arah pembangunan daerah baik jangka pendek, menengah dan jangka panjang. Kebanyakan implementasinya diwujudkan dalam visi dan misi, dijabarkan dalam tujuan, arah kebijakan serta program dan kegiatan.

A. Visi Dan Misi

Visi Daerah yang lahir dari komitmen bersama sejak kepemimpinan Gubernur Gorontalo adalah terwujudnya masyarakat Provinsi Gorontalo yang mandiri, berbudaya entrepreneur, bersandar pada moralitas agama dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Walaupun visi daerah ini adalah gambaran Gorontalo di masa depan, namun signifikansi visual pencapaiannya dapat ditelusuri melalui beberapa argumentasi yaitu aspek kemandirian, entrepreneur dan moralitas agama.

Kemandirian, dilihat dari peningkatan pertumbuhan ekonomi, pendapatan masyarakat serta sejauhmana pemerintah daerah mengembangkan kapasitas berbagai indikator sosial dan budaya masyarakat. Entrepreneur, bahwa pembangunan daerah bergerak tidak bergerak reguler melainkan dinamis, karena itu, dibutuhkan adopsi perilaku entrepreneur dalam konteks mencari inovasi, mengkreasi dan penciptaan hal baru untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sedangkan, moralitas agama, merupakan keyakinan terhadap nilai-nilai kebenaran dan kebaikan yang bersumber dari ajaran agama yang kemudian menjadi acuan dan terkristalisasi dalam perilaku sehari-hari masyarakat.

Lebih lanjut, visi daerah di atas dituangkan dalam formulasi yang lebih aplikatif dalam 3 (tiga) misi, yaitu :

1. Mewujudkan sistem demokrasi dan supremasi hukum melalui praktek penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, transparan dan profesional.
2. Melakukan restrukturisasi, refungsionalisasi, revitalisasi, reaktualisasi lembaga-lembaga pemerintah, kemasyarakatan, adat sebagai wahana kearah terwujudnya *entrepreneurial government* dan masyarakat yang mandiri.

3. Meningkatkan peran masyarakat sebagai mitra dan pelaku utama pembangunan daerah

Visi dan misi di atas diharapkan menjadi media untuk mendesain tujuan, kebijakan serta implementasi program pembangunan daerah. Di awal pembentukannya Provinsi Gorontalo, Pemerintah Daerah bersama-sama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Gorontalo telah menetapkan Rencana Strategis Daerah (Renstrada), sebagai dokumen perencanaan yang memuat kebijakan umum pembangunan daerah selang 2002-2004.

Kristalisasi Renstrada di atas, dapat dilihat melalui implementasi program yang termuat dalam dokumen tersebut, penelusurannya dilakukan melalui aplikasi kebijakan daerah dimaksud oleh seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), melalui beberapa bidang kewenangan sebagai berikut :

a. Bidang Sosial & Budaya, Pendidikan dan Agama

Beberapa program yang terkait dengan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat program peningkatan, perluasan dan pemerataan pendidikan serta kesempatan belajar dan program peningkatan mutu dan relevansi pendidikan dan akuntabilitas pendidikan. Kedua program ini, diarahkan untuk memperbaiki dan membangun sarana dan prasarana pendidikan terutama di daerah yang banyak memiliki desa tertinggal/terpencil, pemberian bea siswa untuk siswa berprestasi dan rawan ekonomi, Meningkatkan peran serta dan swadaya masyarakat untuk menyelenggarakan pendidikan dan kesempatan belajar yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat/ daerah. Selain itu, kedua program tersebut juga dimaksudkan untuk mengembangkan kreatifitas anak didik, mengembangkan ketrampilan anak sesuai dengan kondisi daerah, serta berupaya meningkatkan efisiensi, efektivitas dan produktivitas proses belajar dan mengajar.

Program lainnya adalah peningkatan pemahaman, pengamalan dan kerukunan beragama yang diarahkan untuk memberikan dan memfasilitasi kegiatan keagamaan di daerah. Sedangkan, program peningkatan kesejahteraan sosial dimaksudkan untuk memberikan pelayanan sosial terutama yatim piatu, anak terlantar, manula, masyarakat miskin dan desa

tertinggal dan penyandang cacat dan membangun potensi kesejahteraan sosial melalui peran swadaya masyarakat dan lembaga-lembaga sosial serta mengupayakan terwujudnya kesetiakawanan dan partisipasi sosial masyarakat terhadap masalah-masalah sosial yang muncul dilingkungan sekitarnya.

Lebih lanjut adalah program peningkatan peran pemuda dan pengembangan olahraga. Program ini dilakukan untuk mengembangkan prakarsa masyarakat untuk mengadakan fasilitas olahraga, penjangkaran potensi dan bakat untuk atlet dan olahragawan. Sedangkan program pembangunan kebudayaan dan pelestarian adat-istiadat, budaya, dan bahasa Gorontalo diarahkan untuk melakukan inventarisasi adat-istiadat, seni tradisional suaka peninggalan purbakala dan bahasa & dialek daerah serta menggali nilai-nilai budaya/tradisi berlaku dalam masyarakat.

b. Bidang Kesehatan Kependudukan dan Keluarga Berencana

Upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui intervensi dibidang kesehatan dan KB didorong oleh berbagai isu pokok misalnya masih tingginya angka kematian bayi dan ibu melahirkan, kemudian masih ditemukan kasus gizi buruk balita, rendahnya akses pelayanan kesehatan terutama masyarakat miskin dan beberapa masalah lain terkait dengan kependudukan dan KB.

Sejauh ini, beberapa program yang telah diimplementasikan adalah pertama, peningkatan kuantitas dan kualitas fasilitas kesehatan dan tenaga medis yang ditujukan untuk redistribusi dokter dan perawat sehingga setiap puskesmas dan puskesmas pembantu mempunyai dokter dan perawat / para medis yang memadai. Kemudian, program perbaikan gizi masyarakat yang ditujukan untuk menekan kejadian gizi buruk pada balita, ibu hamil dan menyusui, dan program pemeliharaan kesehatan, pemberantasan penyakit menular dan penciptaan lingkungan sehat dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas hygiene dan sanitasi di tingkat individu dan keluarga.

Roda pembangunan daerah digerakkan untuk menjamin pertumbuhan ekonomi daerah yang bermuara pada peningkatan kapasitas daerah serta

kesejahteraan masyarakat. Se jauh ini, pertumbuhan ekonomi tidak bisa berjalan optimal karena berbagai kendala baik teknis maupun struktural serta minat investasi di daerah. Dalam konteks argumen tersebut, role of government dibutuhkan untuk mendesain agar terjadi pertumbuhan ekonomi yang didalamnya berkembang partisipasi masyarakat dalam makna sebenarnya.

c. Bidang Ekonomi dan Pembangunan

Program yang dilaksanakan di bidang ekonomi dan pembangunan adalah program Pengembangan wilayah strategis dan kerjasama antar daerah/ wilayah yang diarahkan untuk menyediakan infrastruktur dan meningkatkan kualitas SDM di daerah yang dijadikan titik pengembangan ekonomi. Diikuti dengan program penguatan kompetensi inti Prov. Gorontalo dengan fokus di sektor pertanian, peternakan dan perikanan dengan model keterkaitan hulu hilir yang ditujukan untuk membangun dan menyediakan infrastruktur pertanian, alat-alat/ mesin pertanian untuk pengelolaan lahan, pasca panen, penyimpanan dan transportasi.

Kemudian, program Pengembangan tanaman pangan diversifikasi pangan, ketahanan pangan dengan tujuan untuk melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi tanaman pangan (Prioritas Jagung dan Beras), melakukan upaya pengembangan dan rehabilitasi lahan pertanian, pengembangan Produksi pangan utamanya beras, karbohidrat non beras dan sumber protein, serta mengupayakan pengembangan sistem perlindungan dan budidaya tanaman dan ternak unggul daerah.

Program lainnya adalah pengembangan perkebunan rakyat yang ditujukan untuk melakukan peremajaan dan penggantian tanaman kelapa jenis unggul dan Introduksi tanaman perkebunan yang mempunyai nilai ekonomi tinggi. Diikuti dengan implementasi program Pembangunan Kehutanan dan pengembangan hutan rakyat yang diaplikasikan untuk melakukan konservasi dan reboisasi hutan dan tanah kritis dengan tanaman cepat tumbuh dan memiliki nilai ekonomi tinggi.

Lebih lanjut, dilaksanakan pula program pengembangan perikanan dan kelautan dengan tujuan untuk menyediakan jaring pengaman ekonomi nelayan, pengadaan infrastruktur perikanan (Pelabuhan pendaratan, cold storage, pabrik es, peralatan perlengkapan ikan, pengolahan pasca panen ikan), merintis pilot project pembangunan desa nelayan yang merupakan unit ekonomi yang berbasis pada kegiatan perikanan dan kelautan serta Melakukan konservasi kawasan pantai dan laut teritorial untuk menjaga terpeliharanya tangkapan lestari sumberdaya kelautan.

Pengembangan wilayah strategis dan kerjasama antar daerah/ wilayah yang bermaksud Menyediakan infrastruktur dan meningkatkan kualitas SDM di daerah yang dijadikan titik pengembangan ekonomi. Selain itu, diimplementasikan pula program penguatan landasan pengembangan ekonomi yang berkelanjutan yang diarahkan untuk memberdayakan UKM, Koperasi dan BUMD dan program Pengembangan wilayah tertinggal dan transmigrasi dengan sasaran untuk membangun kawasan transmigrasi sebagai wilayah baru untuk pengembangan wilayah dan perekonomian di kawasan tertentu.

Untuk mengembangkan industri kecil dilakukan melalui program pengembangan dan pemberdayaan industri kecil dan rumah tangga yang diarahkan untuk mengidentifikasi potensi berbagai jenis kegiatan industri kecil dan rumah tangga yang potensial bagi income generating, penciptaan dan perluasan kesempatan kerja dan berusaha serta merintis pendirian pilot project sentra industri kecil yang berbasis pada kerajinan rakyat dalam satu kawasan.

Pengembangan ketenagakerjaan dan pendapatan daerah juga diupayakan terus berkembang melalui implementasi program pengembangan ketenagakerjaan dengan harapan terjadi peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja melalui sertifikasi dan standardisasi profesi serta program peningkatan Pendapatan Asli Daerah dan Keuangan Daerah dengan maksud untuk Ekstensifikasi dan Intensifikasi objek pajak dan retribusi, pengadaan sarana dan prasarana untuk menunjang kinerja

pengelola PAD dan penerapan sistim komputerisasi Samsat dan Sistim Akuntansi Keuangan Daerah.

Untuk berfungsi pranata ekonomi daerah, maka dukungan infrastruktur sangat penting. Karena itu, dilaksanakan pula program pembangunan, pemeliharaan & pengoptimalan infrastruktur untuk meningkatkan, memperlancar kegiatan ekonomi dan mobilitas arus barang dan manusia, serta meningkatkan daya saing komoditas utama Gorontalo yang ditujukan untuk Peningkatan kinerja dan penambahan infrastruktur pelabuhan, peningkatan kinerja dan penambahan infrastuktur bandar udara, Djalaludin, pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan jalan dan jembatan, serta penyediaan jaringan telepon. Program pembangunan infrastruktur lainnya adalah pembangunan waduk dan bendungan untuk pengairan dan tenaga listrik guna meningkatkan kinerja sektor pertanian dan industri yang berhubungan dengan sektor pertanian dengan tujuan untuk Pembangunan, pemeliharaan dan peningkatan kinerja irigasi dan Pengendalian banjir dan pengembangan dan pendayagunaan sumber air.

d. Bidang Investasi dan Pengembangan Kawasan

Beberapa program yang dilaksanakan untuk bidang investasi dan pengembangan kawasan adalah promosi potensi ekonomi daerah yang dilakukan untuk menarik minat sektor usaha untuk berinvestasi (PMA dan PMDN) dan melaksanakan berbagai Promosi dan roadshow peluang investasi di Gorontalo.

e. Bidang Ilmu dan Teknologi

Program yang dijalankan untuk mengembangkan iptek adalah program peningkatan kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan tujuan Mengembangkan pengkajian dan penelitian ilmu pengetahuan dan teknologi yang sejalan dengan kebijakan pembangunan daerah serta melakukan diseminasi kegiatan penelitian dan pengembangan pada bidang-bidang yang menjadi prioritas percepatan pembangunan.

f. Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

Terdapat 2 (dua) program untuk mengelola SDA dan Lingkungan yaitu pertama, Pengembangan usaha pertambangan rakyat terpadu, pemanfaatan sumberdaya mineral dan pengembangan tenaga listrik dan energi dengan maksud untuk melakukan kegiatan penelitian dan pengkajian pertambangan skala kecil, eksplorasi berbagai tambang dan bahan galian, dan pengembangan listrik pedesaan.

Sedangkan program pengendalian kerusakan pencemaran lingkungan hidup diarahkan untuk memfasilitasi pembentukan lembaga lingkungan hidup di daerah juga diarahkan untuk menjamin kegiatan pembangunan dilaksanakan sesuai prinsip pembangunan berkelanjutan, dalam artian melakukan upaya untuk mengendalikan kerusakan lingkungan dan pelestariannya.

g. Bidang Hukum dan Pemerintahan yang baik

Bidang hukum dan pemerintahan yang baik lebih ditujukan pada eksplorasi serta manajemen perundangan di daerah, dalam artian tidak menangani persoalan hukum dan peradilan yang tetap dikelola pemerintah pusat. Terdapat 2 (dua) program yang dilaksanakan dalam bidang ini, yaitu pertama, penegakan supremasi hukum dengan beberapa kegiatan pokok, yaitu menyusun dan menyempurnakan produk hukum, memberdayakan dan meningkatkan kinerja kelembagaan hukum, dan membangun Sistem dokumentasi dan informasi hukum serta melakukan fasilitasi/penyelesaian sengketa hukum antara pemerintah daerah dengan pihak lain.

Program kedua adalah penyelenggaraan pemerintahan yang baik (Good Governance) dengan tujuan untuk mengembangkan sistem informasi dan pengawasan yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel, meningkatkan kualitas informasi dan sistem perencanaan, pengawasan, pengendalian dan pelaporan, menegakkan etika dan moral aparat di lingkungan Pemerintah Daerah yang berlandaskan pada komitmen terhadap nilai bersih, transparan dan profesional serta meningkatkan kualitas pendidikan, pelatihan dan penambahan pengetahuan yang sesuai dengan

bidang kerjanya dan terakhir diarahkan pada upaya represif kepada aparatur pemda yang terbukti menyalahgunakan kekuasaan dan tidak mengindahkan prinsip bersih, transparan dan profesional.

Program terakhir dibidang ini adalah program peningkatan kualitas pelayanan publik dengan orientasi pada upaya untuk menyusun standar pelayanan publik yang cepat, tepat dan memuaskan antara lain diaplikasikan dalam penyusunan SOP dan penetapan Peraturan Daerah tentang Kemudahan Investasi.

h. Bidang Politik dan Pemerintahan

Bidang politik dan pemerintahan tidak luput dari perhatian pemerintah daerah, dalam hal ini diimplementasikan melalui 2 (dua) program utama. Program pertama adalah pengembangan kehidupan politik yang demokratis. Program ini ditujukan untuk mengembangkan etika, moral dan budaya politik yang bersandarkan pada nilai-nilai luhur Pancasila untuk menjaga kesatuan dan persatuan serta peran dan partisipasi organisasi politik dan masyarakat lainnya.

Program kedua adalah mengupayakan peningkatan kualitas dan kinerja aparatur pemerintah dengan melakukan penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan dan mengupayakan peningkatan kualitas pelayanan publik.

i. Komunikasi, Informasi dan Media Massa

Bidang ini diaplikasikan melalui 1 (satu) program utama yaitu mengupayakan pengembangan informasi, komunikasi dan media massa melalui kegiatan pokok akses masyarakat terhadap informasi Pemerintah Daerah dan melakukan penyebaran informasi pembangunan dan menyediakan sarana komunikasi yang murah, efisien, efektif yang menjangkau daerah pedesaan dan terpencil.

j. Bidang Keamanan dan Ketertiban Umum

Bahwa kondisi keamanan dan ketertiban menjadi prasyarat utama pembangunan daerah dapat dilaksanakan dan berjalan optimal. Karena itu, dirasa penting untuk penciptaan kondisi keamanan yang kondusif melalui

implementasi program pembinaan keamanan dan ketertiban umum yang diarahkan untuk mendorong dan membina kegiatan pengamanan swakarsa dalam rangka kewaspadaan daerah serta mendorong dan meningkatkan unjuk kerja sistim keamanan lingkungan.

Seiring dengan perkembangan kebutuhan dan aspirasi masyarakat serta perubahan landasan hukum penyelenggaraan otonomi daerah yaitu revisi Undang – Undang Nomor 22 tahun 1999 dan Undang – Undang Nomor 25 Tahun 1999 menjadi Undang – Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah, Pemerintah Provinsi Gorontalo memandang perlu untuk melakukan penyesuaian-penyesuaian terhadap materi Renstrada, terutama menyangkut masa berlaku dan Program Pembangunan Daerah. Upaya penyesuaian ini juga untuk merenspon perubahan sistem perencanaan pembangunan nasional sebagaimana tertuang Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Berdasarkan Undang-undang tersebut, Perencanaan Pembangunan Nasional terdiri atas Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk 20 tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk 5 tahun dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan rencana pembangunan tahunan.

Melalui pembahasan dan diskusi yang cukup panjang, akhirnya RPJMD Transisi sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Renstrada 2002-2004 ditetapkan melalui Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2005-2007. Secara umum, tidak banyak perubahan RPJMD dengan Renstrada, namun secara nyata terjadi perubahan dalam struktur serta penambahan dalam beberapa program. Namun, dalam konteks visi dan misi masih tetap mengikuti Rentrada 2002-2004.

B. Faktor Penentu Keberhasilan

Identifikasi faktor-faktor penentu keberhasilan merupakan tahapan awal dalam perencanaan strategis. Analisis mendalam terhadap faktor penentu keberhasilan tersebut akan menghasilkan beragam informasi menyangkut peluang dan kendala yang seharusnya diantisipasi dalam penentuan arah kebijakan pembangunan jangka pendek. Faktor-faktor penentu keberhasilan ini mencakup faktor pendukung internal dan faktor pendukung eksternal.

1. Faktor Pendukung Internal

1.1 Sumber Daya Manusia

1.1.1 Sumber Daya Aparatur

Tidak dapat dipungkiri bahwa pencapaian kinerja Pemerintah Provinsi Gorontalo menempatkan SDM aparatur sebagai salah satu faktor penentu keberhasilan. Dalam struktur SKPD, PNS memainkan peran penting dalam menggerakkan organisasi melalui pelaksanaan kegiatan masing-masing.

Kondisi akhir tahun 2006 (medio Juli), jumlah PNS Pemerintah Provinsi Gorontalo tercatat 1.521 orang. Tidak dipungkiri bahwa dari sisi jumlah PNS, dengan asumsi bahwa eselon 4 (total 353 orang) masing-masing membutuhkan 3 orang staf (berarti kebutuhan staf mencapai 1059 orang) maka jumlah PNS yang ada belum signifikan untuk menjangkau kompleksitas kegiatan dan penguatan fungsi serta tugas pokok SKPD.

Pertanyaan kemudian adalah apakah keterbatasan jumlah PNS membawa makna negatif dalam kinerja pembangunan tahun 2005? Yang menarik, struktur pendidikan PNS menunjukkan bahwa mayoritas pendidikan mereka adalah S1 sebanyak 856 orang atau 56,27%, D1, D2 dan D3 sebanyak 163 orang atau 10,72 % dan SLTA ke bawah sebanyak 502 orang atau 33,00 %. Artinya, keterbatasan PNS bukan menjadi kendala dalam optimalisasi kinerja Pemerintah

Provinsi tahun 2005, karena melihat basic pendidikan tersebut, mayoritas PNS memiliki kemampuan dan pengalaman yang cukup. Apalagi melalui internal SKPD serta BKD dan Diklat terus diupayakan pengembangan ketrampilan teknis dan fungsional, bahkan, dukungan fasilitas kantor dan 1.310 tenaga kontrak menjadi media efektif untuk membantu implementasi tupoksi masing-masing PNS.

1.2 Sumber Daya Masyarakat

1.2.1 Jumlah, Persebaran dan Kepadatan Penduduk

Jumlah penduduk Provinsi Gorontalo saat ini berjumlah 909.083 jiwa yaitu Kota Gorontalo 156.390 jiwa, Kabupaten Gorontalo 416.224 jiwa, Kabupaten Boalemo 106.790 jiwa, Kabupaten Bone Bolango 123.300 jiwa dan Kabupaten Pohuwato 106.379 jiwa dengan kepadatan masing-masing adalah Kota Gorontalo 2.157 jiwa per km², Kabupaten Gorontalo 121 jiwa per km², Kabupaten Boalemo 39 jiwa per km², Kabupaten Bone Bolango 59 jiwa per km² dan Kabupaten Pohuwato 25 jiwa per km². Dilihat dari distribusi kepadatan tersebut, maka kepadatan penduduk Provinsi Gorontalo pada tahun 2005 mencapai 71 jiwa per Km² dengan tingkat pertumbuhan penduduk 1,46 % per tahun.

1.2.2 Struktur Penduduk Menurut Jenis Kelamin

Data terakhir menunjukkan bahwa penduduk jenis kelamin laki-laki masih lebih kecil (450.798 jiwa) dibandingkan penduduk perempuan (458.285 jiwa) dengan perincian sebagai berikut : Kota Gorontalo laki-laki 76.182 jiwa dan perempuan 80.208 jiwa, Kabupaten Gorontalo laki-laki 205.041 jiwa dan perempuan 211.183 jiwa, Kabupaten Boalemo laki-laki 54.910 jiwa dan perempuan 51.880 jiwa, sedangkan Kabupaten Bone Bolango laki-laki 59.974 jiwa dan perempuan 63.326 jiwa serta Kabupaten Pohuwato laki-laki 54.691 jiwa dan perempuan 51.668 jiwa.

1.2.3 Jumlah Tenaga Kerja Berdasarkan Lapangan Usaha

Jumlah tenaga kerja dapat dilihat pada tabel 1., dimana sebagian besar tenaga kerja terdistribusi pada bidang pertanian yakni mencapai 48,04 %, diikuti dengan bidang perdagangan dan restoran mencapai 16,25%. Sedangkan industri olahan hanya menyerap 8,12% dari tenaga kerja yang ada. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel II-1. Jumlah dan Persentase Tenaga Kerja Tahun 2005

Lapangan Usaha	Jumlah (orang)	%
Pertanian	155.465	48,04
Pertambangan dan Pengecilian	4.545	1,40
Industri Olahan	26.265	8,12
Listrik, Gas dan Air Bersih	2.085	0,64
Bangunan	12.560	3,88
Perdagangan dan restoran	52.605	16,25
Pengangkutan dan Komunikasi	24.030	7,43
Keuangan dan persewaan	3.000	0,93
Jasa-jasa lain	43.070	13,31
T o t a l	328.242	100

Sumber : BPS, Sakernas 2004-2005

1.3 Sumberdaya Alam

1.3.1 Pertanian dan Peternakan

Provinsi Gorontalo memiliki sumberdaya alam yang cukup potensial untuk dikembangkan, terutama potensi pertanian, perikanan, kehutanan, perkebunan dan pertambangan. Potensi pertanian dan perikanan merupakan sektor yang menjadi prioritas pengembangan yang diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Apalagi sebagian besar mata pencaharian penduduk adalah bertumpu pada sektor pertanian dan perikanan.

Lahan pertanian yang ada sebagian besar diusahakan oleh masyarakat untuk menanam sejumlah komoditas utama seperti padi sawah dan jagung. Dalam rangka pengembangan program agropolitan, jagung dijadikan komoditas unggulan.

Dari luas wilayah Provinsi Gorontalo 1.221.544 Ha, sebesar 463.649,09 Ha atau 37,95 % merupakan areal potensial pertanian tetapi yang dimanfaatkan baru sekitar 148.312,78 Ha atau 32 % sehingga masih terdapat peluang pengembangan lahan seluas 315.336,31 Ha. Agropolitan merupakan sektor penggerak dan pendorong utama dan peningkatan perekonomian masyarakat yang diarahkan sebagai program yang memberikan multiplier effect terhadap sektor-sektor lain. Prioritas pengembangan diproyeksikan pada komoditi jagung dengan tidak meninggalkan pengembangan komoditi lainnya.

Di bidang Peternakan, dengan bertambahnya luas areal kebun Jagung di Provinsi Gorontalo, maka semakin bertambah pula limbah jagung yang dapat dimanfaatkan sebagai pakan ternak. Pola pengembangan ternak di Provinsi Gorontalo adalah model integrasi antara ternak Sapi dan tanaman (jagung, tebu dan padi).

Populasi ternak sapi potong di Gorontalo sebesar 250.993 ekor dan didukung dengan populasi ternak kambing dan unggas masing-masing sebesar 86.533 dan 983.069 ekor secara umum memenuhi pasokan kebutuhan pangan di Gorontalo. Bahkan sebagian produksi ternak tersebut, menjadi komoditas perdagangan antar pulau.

1.3.2 Perikanan dan Kelautan

Potensi perikanan dan kelautan di Provinsi Gorontalo merupakan peluang terbesar dan modal pembangunan.

Perikanan dan kelautan Gorontalo potensial untuk dikembangkan. Hal ini ditunjukkan dengan panjang garis pantai

560 km dan luas wilayah laut 50.500 km². menurut Komisi Nasional Stock Assesement tahun 2002 Provinsi Gorontalo memiliki 2 Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) yaitu WPP Teluk Tomini sampai dengan Laut Seram dan WPP Laut Sulawesi sampai dengan Samudera Pasifik, memiliki potensi perikanan tangkap 1.226.090 ton per tahun dengan tingkat produksi sebesar 37.036 ton atau 3,02 % pada tahun 2005. Selain itu, terdapat pula potensi perikanan budidaya baik budidaya laut (potensi produksi budidaya laut sebesar 25.050 ton per tahun dengan tingkat pemanfaatan pada tahun 2005 sebesar 5.648,3 ton (22.55 %), potensi produksi budidaya air payau 59.770 ton per tahun dengan tingkat pemanfaatan pada tahun 2005 sebesar 1.553,2 ton (2.60 %) dan potensi budidaya air tawar sebesar 5.041 ton per tahun dengan tingkat pemanfaatan pada tahun 2005 sebesar 928,6 ton (18,42 %).

1.3.3 Kehutanan dan Perkebunan

Gorontalo memiliki potensi hutan seluas ± 826.378,12 Ha yang terdiri dari hutan lindung, hutan produksi dan hutan konservasi. Hutan yang belum dimanfaatkan ± 279.466,42 Ha. Investasi di bidang kehutanan yang prospektif adalah pengembangan hutan tanaman industri pada areal tertentu terutama untuk pengembangan kayu jati, sengon dan mahoni. Potensi kehutanan lain yang mendukung sektor industri pengolahan hasil hutan meliputi industri furniture berbahan kayu, rotan, industri damar, selain budidaya lebah madu dan lain-lain. Dalam rangka pengelolaan dan pemanfaatan hasil hutan tetap diperhatikan kelestarian dan ekologi hutan. Pengembangan hutan produksi harus diikuti dengan penanaman kembali agar tidak terjadi deforesterisasi sehingga kelangsungan produksi tetap terjaga dan tidak mengakibatkan kerusakan lingkungan.

Menyangkut perkebunan, luasan lahan perkebunan berpeluang untuk dikembangkan karena tingkat pemanfaatannya belum optimal. Potensi aral perkebunan seluas 180.011, 80 Ha yang belum dimanfaatkan ± 102.510, 72 Ha. Komoditi yang cocok dikembangkan di wilayah ini antara lain kelapa, cengkeh, pala kemiri, kakao.

1.3.4 Pertambangan

Sejauh ini, potensi sumber daya mineral memiliki peluang untuk dikembangkan dengan nilai ekonomi tinggi seperti **Emas** (dengan jumlah sumberdaya terkira 340.000.000 Ton. Tersebar di Kabupaten Gorontalo, Kabupaten Pohuwato dan Kabupaten Bone Bolango), **Batu Gamping/Batu Kapur** (1.142.685.000 Ton tersebar di Kota Gorontalo, Kabupaten Gorontalo, Kabupaten Boalemo, dan Kabupaten Bone Bolango). **Toseki** (11.700.000 Ton tersebar di Kabupaten Pohuwato), **Marmar** (tersebar di Kabupaten Bone Bolango), Granit (917.362.500 ton tersebar di Kabupaten Gorontalo, Boalemo, Pohuwato, Bone Bolango dan Kota Gorontalo), **Sirtu** (113.000.000 M3 tersebar di Kabupaten Gorontalo, Boalemo, Pohuwato, Bone Bolango dan Kota Gorontalo), **Feldspar** (1.000.000 M3, tersebar di Kabupaten Gorontalo) dan **Lempung** (300.000.000 M3 tersebar disekitar danau Limboto)

1.3.5 Pariwisata

Gorontalo mempunyai obyek wisata yang tersebar di lima Kabupaten/Kota dengan karakter, keindahan alam yang masih orisinil disertai dukungan keanekaragaman adat dan budaya. Potensi obyek wisata Gorontalo antara lain Benteng Otanaha, Kolam renang Potanga dan Lahilote, Pantai Pohe di Kota Gorontalo. Pentadio Resort, Pendaratan Soekarno Iluta, Danau Limboto, Rumah Adat Bantayo Poboide, Kerajinan Kerawang dan

Benteng Oranye di Kabupaten Gorontalo. Air Terjun Ayuhulalo, Pantai Boalemo Indah dan Pulau Bitila di Kabupaten Boalemo, kemudian, Pantai Bumbulan Indah, Cagar Alam Panoa, Perkampungan Suku Bajo di Kabupaten Pohuwato serta Pemandian Air Panas Lombongo, Taman Nasional Bogani Nani Wartabone dan Taman Laut Olele di kabupaten Bone Bolango.

Obyek wisata yang merupakan andalan Gorontalo diprioritaskan pada wisata bahari yang sebagian besar Obyek Daerah Tujuan Wisata yang tersebar di lima wilayah Kabupaten/Kota. Kondisi obyek wisata tersebut sebagian besar belum mendapat sentuhan yang memadai, disamping itu, belum dikemas dalam satu paket wisata terkait dengan wisata nasional sehingga belum mampu memberikan kontribusi yang signifikan bagi peningkatan PAD.

1.4 Infrastruktur

Ketersediaan infrastruktur berupa jalan, jembatan, pergudangan, bandar udara dan pelabuhan laut, energi listrik, dan telekomunikasi menjadi salah satu prasyarat awal bagi kegiatan usaha investasi PMDA dan PMDN bahkan secara mikro geliat ekonomi masyarakat pun memerlukan dukungan infrastruktur untuk mobilisasi dan pemasaran produksi. Realitas urgensi tersebut menjadikan infrastruktur salah satu faktor penentu keberhasilan.

Sejauh ini, kondisi infrastruktur sampai dengan tahun 2004 masih perlu penanganan dan perhatian ekstra. Data terakhir menunjukkan bahwa panjang jalan provinsi dan negara yang rusak berat masing-masing 236.65 km dan 81,4 km, dengan belum meratanya dukungan infrastruktur penunjang program unggulan.

Melihat kondisi tersebut, pemerintah daerah melalui SKPD terkait, terus mengupayakan penyediaan infrastruktur dasar maupun penunjang kegiatan ekonomi masyarakat. Melalui upaya tersebut, diharapkan akses daerah menjadi semakin luas baik lalu lintas barang dan orang bahkan

lebih memperkuat sinergitas kegiatan pembangunan dan meningkatkan daya saing daerah.

1.5 Penerapan New Publik Manajemen

New Public Management (NPM) adalah reproduksi terkini dari perkembangan teori organisasi dan manajemen. Fokus utama NPM lebih menekankan pada pencapaian hasil (*performance achievement*) dibanding *activity achievement* serta sejauhmana pemerintah menunjukkan akuntabilitas kinerja kepada publik.

Melihat urgensi NPM dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, seberapa besar penerapannya akan berdampak pada keberhasilan capaian kinerja pembangunan. Dengan pertimbangan bahwa program orientasi pelaksana dan program pembangunan daerah diarahkan pada hasil (*outcomes*) yang optimal. Artinya bahwa jaminan pengorganisasi pelaksanaan kegiatan akan memberi dampak positif bila NPM diterapkan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Sejauh ini, penerapan NPM telah diakomodir dalam penyelenggaraan pemerintahan di Gorontalo. Walaupun, belum dioperasionalkan pada semua level organisasi dan personil, namun beberapa perubahan dan perbaikan yang coba dilakukan, antara lain, penerapan anggaran berbasis kinerja dan penyusunan neraca daerah yang dibarengi dengan penerapan manajemen akuntansi serta penguatan institusional berupa perubahan struktur Biro Keuangan menjadi Badan Keuangan. Kemudian, perbaikan manajemen kepegawaian dengan membentuk BKD dan Diklat. Reorientasi pola pikir serta cara kerja PNS melalui mind setting, leadership breakthrough dan lain sebagainya. Lebih lanjut, dilakukan pula penerapan entrepreneur government untuk membangun perilaku PNS dengan mengadopsi nilai-nilai

kewirausahaan. Perbaikan akuntabilitas aparat dan organisasi tidak lepas dari perhatian dengan mengoptimalkan kinerja pengawasan eksternal melalui Bawasda dan terakhir dilakukan kerjasama dengan Kejaksaan Tinggi dan Polda.

Hal lain yang dilakukan dalam konteks organisasional adalah meningkatkan kualitas proses dan output pembangunan yaitu: (1) inovasi dalam struktur organisasi agar mampu menghasilkan output yang memiliki relevansi dengan kebutuhan masyarakat; (2) inovasi untuk mengurangi pengaruh *red tape* (hambatan birokrasi); dan (3) inovasi dalam pembuatan keputusan. Dengan dihasilkannya Standar Operasional Pemerintahan (SOP), telah memberikan arah yang jelas dan terukur bagi setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) didalam menjalankan Tugas Pokok dan Fungsinya. Untuk menjalankan SOP tersebut, ditetapkan Lima Nilai Budaya Kerja Pemerintah Provinsi Gorontalo sebagai instrumen implementasi yakni innovation (inovasi), teamwork (kerjasama tim), prosperity (kesejahteraan masyarakat), trust society (kepercayaan masyarakat), dan speed (cepat).

Perlakuan spesifik untuk menjabarkan NPM dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan di atas diharapkan mendorong peningkatan kualitas manajemen organisasional dan efektifitas pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan yang diwujudkan dalam bentuk program dan kegiatan pembangunan yang Pro rakyat, dengan menggunakan cara-cara yang paling dapat diterima oleh masyarakat secara luas (partisipatif).

2. Faktor Pendukung Eksternal

2.1 Kebijakan Pemerintah Nasional

Kebijakan pemerintah seringkali berdampak positif dan negatif pada level pemerintah daerah. Kondisi ini perlu diantisipasi, bahkan kebijakan yang membutuhkan tindak lanjut selanjutnya dijabarkan dalam program pembangunan daerah.

Pengalaman menunjukkan bahwa kebijakan Pemerintah Nasional seringkali mengintervensi pada 3 persoalan mendasar, yaitu keuangan, pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan. Kebijakan dibidang keuangan (fiskal dan moneter) maupun yang menyentuh penyelenggaraan pemerintahan tahun 2005 secara umum tidak memberi pengaruh yang signifikan dalam kinerja pembangunan daerah. Beberapa kebijakan khusus menyangkut pembangunan yaitu kenaikan BBM, dan TDL berdampak sangat besar pada pelaksanaan kegiatan pemerintah. Kenaikan harga barang dan jasa, membuat beberapa kegiatan mengalami penundaan sementara bahkan secara teknis dan finansial perlu dilakukan rebudgeting untuk penyesuaian harga dan lain sebagainya. Kebijakan lain yang mempengaruhi implementasi pembangunan daerah adalah kebijakan ketahanan pangan dan penegakan hak asasi manusia. Kebijakan tersebut, dari kacamata daerah perlu diantisipasi dan dijabarkan dalam kegiatan teknis daerah untuk menjamin kesinambungan program pembangunan nasional.

Realitas tersebut memberi isyarat bahwa pemerintah daerah perlu memberi celah dan mengantisipasi lebih dini penetapan kebijakan pemerintah yang berkaitan regulasi pembangunan pemerintah pusat. Karena efek domino yang ditimbulkan kebijakan pemerintah pusat berdampak luas, untuk kemudian, seringkali mengganggu kelancaran pencapaian kinerja pembangunan daerah.

2.2 Kerjasama Regional dan Internasional

Di awal ligitasi Gorontalo sebagai Provinsi, berbagai keterbatasan seolah tergambar nyata. Persoalan kemiskinan yang memiriskan (mendekati 73% dari total jumlah penduduk), belum lagi anggaran pembangunan (dibawah 10 % dari total anggaran tahun 2005) dan dukungan SDM yang terbatas membuat Pemerintah Daerah berpikir keras untuk memacu pembangunan daerah.

Salah satu strategi yang coba diterapkan adalah membangun aliansi (*networking*) baik lokal, regional, maupun internasional. Aliansi

atau kerjasama tersebut dilakukan dengan asumsi bahwa dengan kapasitas yang terbatas, maka dukungan berbagai pihak dirasa perlu untuk dikembangkan. Kerjasama ini kemudian menjadi salah satu peluang untuk mendukung pencapaian keberhasilan pembangunan daerah.

Sejauh ini, berbagai kerjasama dilakukan baik antar pemerintah daerah, lembaga swasta dan pemerintah, lingkungan akademik, bahkan dengan pihak luar negeri. Beberapa yang dapat disebutkan antara lain : BPKP, Kejaksaan, BPPT, Bakosurtanal, Pemerintah Jepang, UNHAS, UNG, UG, UGM, UNIBRAW, ITB, LAPAN, Pemda Jawa Timur, Pemda DIY dan lain-lain. Diharapkan kerjasama tersebut menjadi media dalam mendukung percepatan pembangunan di Gorontalo.

2.3 Globalisasi

Upaya penataan dan percepatan ekonomi, sangat terkait kesiapan Provinsi Gorontalo menghadapi era globalisasi dan perdagangan bebas. Globalisasi atau Era Milenium ketiga adalah era informasi komunikasi dan transformasi serta teknologi antar bangsa, ras dan suku semakin mendunia dan menghilangkan batas (*borderless*) antar negara.

Kondisi di atas dapat dimanfaatkan oleh negara-negara maju untuk memperluas pasar (liberalisasi pasar global). Akibatnya, masuknya produk-produk luar negeri ke dalam pasar Indonesia untuk bersaing secara fair dan terbuka dengan produk nasional akan sangat berpengaruh terhadap dunia usaha dalam negeri. Hanya produk yang mempunyai keunggulan komparatif dan kompetitif yang akan mampu bersaing di pasar global. Ditambah lagi dengan munculnya kerjasama ekonomi regional untuk membangun kekuatan ekonomi bersama seperti NAFTA, European Union (UE), AFTA, APEC.

Terbentuknya aliansi di atas memberi efek positif dalam format yang sama, kemudian bermunculan pula media kerja sama dengan negara-negara tetangga dalam wadah seperti Association of South East Asian Nation (ASEAN), Sub Regional BIMP-EAGA (Brunai, Indonesia,

Malaysia, Philipina East ASEAN Growt Area), AIDA (Australian Indonesian Development Area), yang dititikberatkan pada kerja sama di bidang ekonomi dan sosial budaya yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat negara-negara yang tergabung di dalamnya, merupakan peluang sekaligus tantangan yang patut diresponi secara serius oleh Pemerintah Provinsi Gorontalo.

Melihat realitas tersebut, maka nuansa globalisasi ini seyogyanya Provinsi Gorontalo harus memiliki kesiapan jika ingin memainkan peranan dalam perdagangan bebas. Produksi komoditas unggulan daerah khususnya pertanian dan perikanan perlu ditingkatkan kualitasnya sehingga memiliki daya saing dalam pasar kompetitif dunia. Apalagi permintaan pasar internasional akhir-akhir ini cukup tinggi terhadap beberapa produk pertanian dan perikanan, antara lain jagung, beras, kopra, ikan tuna, udang, rumput laut.

C. Strategi Pembangunan Daerah

Dalam rangka pencapaian misi pembangunan, maka langkah yang dianggap penting untuk dilakukan adalah menetapkan strategi pembangunan dimana strategi dimaksud merupakan prinsip dasar rencana aksi yang dituangkan melalui program dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan sampai dengan tahun 2007.

Untuk memperoleh rumusan strategi pembangunan daerah yang sesuai dengan potensi dan keanekaragaman daerah, maka ditetapkan model pendekatan yang digunakan adalah pendekatan analisis SWOT yang menggambarkan kekuatan (*strength*), kelemahan (*weakness*), peluang (*opportunity*) dan ancaman (*threat*) yang dimiliki oleh Provinsi Gorontalo.

Analisis SWOT (Strength, Weakness, Opportunity, Threat)

<p>KEKUATAN (S)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.Keamanan dan kestabilan daerah karena kesetiaan masy. Gorontalo kepada NKRI. 2.Kegigihan masyarakat dalam pembangunan yang tercermin melalui falsafah masyarakat <i>Talu Lipu Pe'l, Buhuta Walama, Batanga Pomaya, Alata Potombulu, Nyawa Podungalo.</i> 3.Potensi sumber daya alam untuk menggerakkan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi daerah. 4.Moralitas masyarakat Gorontalo yang tercermin dalam semboyan "<i>Adat bersendikan Syara' dan Syara' bersendikan Kitabullah.</i>" 	<p>KELEMAHAN (W)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemanfaatan potensi sumberdaya alam belum optimal dan iklim kering. 2. Rendahnya kualitas SDM. 3. Terbatasnya infrastruktur. 4. Produktivitas masyarakat, Pemerintahan Daerah serta pemahaman dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan masih rendah.
<p>PELUANG (O)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.Kewenangan untuk mengatur pemerintahan sendiri (otonomi daerah). 2.Permintaan pasar internasional, nasional dan regional terhadap produk pertanian (Jagung) dan perikanan yang tinggi. 3.Penerapan perdagangan bebas regional & global. 4.Posisi strategis Gorontalo terhadap pasar regional dan internasional. 	<p>ANCAMAN (T)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.Persaingan regional dan global dari produk-produk pertanian dan perikanan yang tinggi. 2.Konflik horizontal dibeberapa wilayah. 3.Keterbatasan anggaran pembangunan dari pusat. 4.Minimnya investasi baik PMA maupun PMDN.

Berdasarkan analisis di atas, maka FAKTOR KUNCI KEBERHASILAN yang menjadi **STRATEGI PEMBANGUNAN DAERAH** adalah :

1. **PENATAAN SISTEM PEMERINTAHAN, DEMOKRASI SERTA KEAMANAN DAN KETERTIBAN**, yang diarahkan untuk menata sistem penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan prinsip-prinsip Kepemerintahan yang amanah melalui penerapan manajemen berbasis kinerja, peningkatan pelayanan publik, peningkatan kapasitas dan kemampuan teknis aparatur, peningkatan kesadaran dalam pencegahan korupsi, pelaksanaan mekanisme pengaduan masyarakat, serta evaluasi berkelanjutan, berkembangnya demokrasi dan tegaknya keamanan dan ketertiban daerah.

Penerapan strategi pembangunan ini dimaksudkan untuk mengembangkan sistem pemerintahan daerah berdasarkan prinsip-prinsip Kepemerintahan yang amanah melalui penerapan manajemen berbasis kinerja, peningkatan pelayanan publik, peningkatan kapasitas dan kemampuan teknis aparatur, peningkatan kesadaran dalam pencegahan korupsi, pelaksanaan mekanisme pengaduan masyarakat, dan evaluasi berkelanjutan, mewujudkan sistem

demokrasi serta tegaknya supremasi hukum di daerah. Kelembagaan pemerintahan yang terbangun diharapkan memiliki daya tahan terhadap berbagai permasalahan sebagai suatu sistem sosial politik yang *sustainable* (berkelanjutan). Di atas landasan sistem sosial politik yang berkelanjutan tersebut dikembangkan peningkatan kapasitas dan kemampuan pemerintahan daerah didalam menjalankan tugas dan fungsinya dalam kerangka pelayanan kepada masyarakat, serta mewujudkan demokratisasi serta keamanan dan ketertiban, yang merupakan bagian penting dari strategi pembangunan kedua.

Strategi ini juga dimaksudkan untuk membangun demokrasi yang dijiwai oleh Pancasila dan Pembukaan UUD 1945 yaitu demokrasi yang mengandung elemen tanggung jawab disamping hak. Penekanan yang berlebihan pada hak akan membentuk masyarakat yang individualistis, tak teratur, dan penuh dengan konflik. Sebaliknya penekanan yang berlebihan dengan tanggung jawab dapat menciptakan masyarakat yang kerdil, tertekan, tidak kreatif, dan pada akhirnya melahirkan perlawanan dan pemberontakan.

2. MEMBANGUN KOMPETENSI INTI GORONTALO, merupakan *grand strategy tahap pertama* sebagai upaya mengembangkan ekonomi kerakyatan dan SDM daerah. Diarahkan pada pengembangan *core competency* Provinsi Gorontalo terutama untuk mengembangkan kinerja sektor unggulan daerah yang bermuara pada upaya mengkreasi *branding image* daerah. Melalui strategi kedua ini, pembangunan daerah digerakkan melalui basis unggulan daerah (menjadi *prime mover*) dalam upaya akselerasi pembangunan. Pengembangan kompetensi inti ini merupakan langkah awal percepatan pembangunan daerah.

3. MEMBANGUN GORONTALO MENUJU MASYARAKAT MANDIRI DAN BERBUDAYA ENTREPRENEUR, merupakan *grand strategy tahap kedua* yang diarahkan untuk mendukung pengembangan industri kecil dan menengah, mengembangkan sektor pendukung unggulan daerah serta pembangunan infrastruktur dan sektor lainnya untuk mendorong peran dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

Strategi ketiga ini diarahkan pada dua sasaran pokok yaitu pemenuhan hak dasar rakyat serta penciptaan landasan pembangunan yang kokoh. Sesuai

amanat konstitusi, peningkatan kapasitas dan kemampuan masyarakat harus dilakukan melalui penyediaan dan pemenuhan hak-hak dasar rakyat.

Hak-hak dasar rakyat dalam bentuk bebas dari kemiskinan, pengangguran, dan keterbelakangan menjadi prioritas untuk diwujudkan.

Pembangunan masyarakat mandiri dan berbudaya entrepreneur dilakukan melalui pembangunan *hardware* (infrastruktur) dasar. Selain itu dilakukan pula ekonomi dan sosial kemasyarakatan yang diarahkan untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan membangun industrialisasi daerah.

D. Agenda Pembangunan Daerah 2002-2006

Berdasarkan Visi, Misi, Strategi Pembangunan yang telah diuraikan di atas, disusun 3 (tiga) AGENDA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2002-2007, yaitu :

- a. Agenda menciptakan pemerintahan bersih, transparan dan profesional, penegakan sistem demokrasi serta keamanan dan ketertiban.
- b. Agenda meningkatkan peran masyarakat sebagai mitra dan pelaku utama pembangunan.
- c. Agenda membangun entrepreneur government dan masyarakat mandiri.

Masing-masing agenda tersebut memiliki beberapa prioritas, yaitu :

AGENDA MENCIPTAKAN PEMERINTAHAN BERSIH, TRANSPARAN DAN PROFESIONAL DENGAN PENEGAKAN SISTEM DEMOKRASI SERTA KEAMANAN DAN KETERTIBAN

Beberapa penjelasan dari agenda pertama berkaitan dengan 3 (aspek utama yaitu pertama, pemerintahan yang amanah berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang memberikan pelayanan yang berkualitas. Sedangkan, kedua, masyarakat yang demokratis mengarah pada penciptaan kondisi sosial dan politik yang kondusif. Selanjutnya, ketiga, menciptakan keamanan dan ketertiban bermakna upaya pemerintah mendesain pranata (regulasi) hukum secara efektif dan menjamin kondusifnya keamanan dalam daerah.

Sasaran dari agenda menciptakan pemerintahan bersih, transparan dan profesional dengan penegakan sistem demokrasi serta keamanan dan ketertiban adalah, pertama, melakukan pembenahan hukum dan menciptakan stabilitas keamanan daerah serta menciptakan kondisi sosial politik masyarakat yang kondusif, terkristalisasi dalam tersedianya produk hukum, penyuluhan dan bantuan hukum, berkembangnya kehidupan politik yang demokratis, serta mengupayakan keamanan dan ketertiban umum.

Kedua, mewujudkan pemerintahan yang amanah yang diarahkan untuk meningkatkan kualitas dan kinerja aparatur, penataan kelembagaan, peningkatan kualitas pelayanan publik dan terselenggaranya pemerintahan daerah dalam konteks otonomi daerah, serta pengembangan informasi dan komunikasi.

1. Prioritas peningkatan keamanan dan ketertiban serta menciptakan kondisi sosial politik masyarakat yang kondusif
2. Prioritas mewujudkan pemerintahan yang amanah

AGENDA MEMBANGUN ENTREPRENEURIAL GOVERNMENT DAN MASYARAKAT MANDIRI

Agenda membangun entrepreneurial government dan masyarakat mandiri berkaitan dengan upaya Pemerintah Provinsi Gorontalo menciptakan akselerasi pembangunan daerah melalui kreasi *core competency* atau sektor-sektor unggulan.

Sasaran dari agenda ini adalah pertama, mengembangkan SDM daerah, kedua, pengembangan pertanian melalui Agropolitan, dan ketiga, pengembangan perikanan dan kelautan. Sehingga, melalui upaya mendorong ketiga sektor tersebut diharapkan dapat menggerakkan pembangunan daerah sebagai *prime mover* untuk menarik pengembangan sektor-sektor lainnya.

1. Pengembangan SDM daerah
2. Pengembangan pertanian agropolitan
3. Pengembangan perikanan dan kelautan

AGENDA MENINGKATKAN PERAN MASYARAKAT SEBAGAI MITRA DAN PELAKU UTAMA PEMBANGUNAN

Agenda membangun Gorontalo menuju masyarakat yang mandiri dan berbudaya entrepreneur berkaitan dengan upaya Pemerintah Provinsi Gorontalo untuk melakukan reaktualisasi, mendorong, dan memberdayakan masyarakat yang terkristalisasi dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Sasaran dari agenda ini adalah (1) mengembangkan infrastruktur penunjang pembangunan daerah, (2) mengembangkan daya saing industri dan pemasaran produksi lokal, (3) mengembangkan kepariwisataan daerah, (4) mengembangkan Koperasi dan UKM, (5) mengembangkan pertambangan dan energi, (6) meningkatkan kesehatan masyarakat, (7) meningkatkan kesejahteraan sosial, (8) mengembangkan kehidupan beragama, (9) memperbaiki iklim ketenagakerjaan, (10) pengembangan kependudukan, (11) pengembangan perumahan dan permukiman, (12) pengembangan wilayah, (13) pengembangan sumber daya alam dan lingkungan hidup, (14) pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan terakhir (15) meningkatkan pendapatan daerah.

Berkaitan dengan Agenda Membangun Gorontalo Menuju Masyarakat Mandiri dan Berbudaya Entrepreneur, di bawah ini akan diuraikan prioritas pembangunan yang akan dilaksanakan, disertai dengan permasalahan, sasaran dan program pelaksanaannya, sebagai berikut :

1. Peningkatan Infrastruktur Daerah
2. Peningkatan Daya Saing Industri dan Pemasaran Produksi Lokal
3. Peningkatan Pengembangan Kepariwisata Daerah
4. Pemberdayaan Koperasi dan UKM
5. Peningkatan Pengelolaan Pertambangan dan Energi
6. Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat
7. Peningkatan Kesejahteraan Sosial
8. Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama
9. Perbaikan Iklim Ketenagakerjaan
10. Pengembangan Perumahan dan Permukiman
11. Pengembangan Wilayah

12. Perbaikan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
13. Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Air

E. Tujuan Dan Sasaran Pembangunan Tahun 2002-2006

Selain, kristalisasi visi dan misi yang secara makro menjadi patron dalam akselerasi pembangunan daerah, juga perlu dipertimbangkan argumentasi faktor penentu keberhasilan (*key factors*) yang diuraikan di atas, baik menyangkut kondisi internal maupun eksternal.

Beberapa faktor internal menjadi sumber kekuatan daerah, antara lain, SDA, dukungan SDM aparatur maupun penerapan *New Public Management* menjadi peluang bagi Gorontalo untuk optimalisasi kinerja pemerintah daerah. Disisi lain, kebijakan pemerintah pusat dan globalisasi menjadi tantangan dalam pembangunan daerah.

Mengacu pada visi, misi serta peluang dan tantangan di atas, maka tujuan pembangunan diarahkan pada :

1. Mewujudkan peningkatan kompetensi SDM masyarakat dan aparatur pemerintah.
2. Terwujudnya percepatan pembangunan dan perekonomian daerah dengan memacu perkembangan sektor pertanian dan perikanan.
3. Mewujudkan masyarakat mandiri sehingga mampu berpartisipasi dalam pembangunan.

Berdasarkan tujuan tersebut di atas, maka sasaran utama pembangunan daerah tahun 2002-2006, adalah :

1. Terwujudnya peningkatan kompetensi SDM masyarakat dan aparatur pemerintah.
2. Terwujudnya percepatan pembangunan dan perekonomian daerah dengan memacu perkembangan sektor pertanian dan perikanan.
3. Terwujudnya masyarakat mandiri sehingga mampu berperan dalam pembangunan daerah.

F. Program Unggulan

Untuk lebih memfokuskan keragaman program dan kegiatan, sejauh ini, tiga Program unggulan Provinsi Gorontalo, yang dicanangkan sejak tahun 2002, menempati porsi utama untuk membingkai akselerasi pembangunan daerah sampai dengan tahun 2006, ketiga program unggulan tersebut :

- Penataan Sumberdaya Manusia mencakup peningkatan kualitas, penempatan pejabat sesuai keahlian dan pengkaderan SDM pemerintah yang mempunyai spirit *Enterpreneurship*, inovatif, cerdas dan memiliki dedikasi dan pengabdian yang tinggi.
- Menjadikan Gorontalo sebagai Provinsi Agropolitan, Provinsi yang memiliki kompetensi dibidang pertanian.
- Pengembangan ekonomi kelautan dengan sasaran peningkatan kinerja sektor perikanan dan pengembangan wilayah pesisir.

G. Rencana Kinerja Tahun 2002-2006

Rencana Kinerja merupakan media aktualisasi perencanaan strategis menuju pada penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah. Kajian rencana kinerja Tahun 2002-2007, berkaitan dengan 2 (dua) aspek pokok, yaitu rencana kinerja sasaran dan rencana kinerja kegiatan.

Secara garis besar, rencana kinerja sasaran mencakup sasaran yang akan dicapai disertai dengan indikator sasaran, target dan realisasinya. Optimalisasi sasaran ini, kemudian akan menunjukkan dampak pembangunan daerah secara makro di tahun 2002-2006. Sedangkan, rencana kinerja kegiatan akan dieksplor lebih jauh output dan outcomes, jika memungkinkan diarahkan sampai pada *benefit* dan *impact*.

